



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 April 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI  
**SUB UNIT KERJA** : KEPALA LEMBAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AGUS PRAMUSINTO
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 674427

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 2.030.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/100 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 394 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 319 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 104 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 430 m2 di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
6. Tanah Seluas 700 m2 di KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 255.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 G A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. ----**

**D. SURAT BERHARGA**

**Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.071.400.430
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.356.400.430
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.356.400.430

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **12 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.